

Judul : Penanganan cepat, pengaduan JKN makin berkurang
Tanggal : Sabtu, 27 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penanganan Cepat

Pengaduan JKN Makin Berkurang



Gamal

ANGGOTA Komisi IX DPR Gamal menyoroti pola penanganan keluhan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum menyentuh akar masalah. Pasalnya, pengaduan sama yang terus muncul dari masyarakat.

Gamal mengatakan, kecepatan dalam menanggapi keluhan memang penting, tetapi tidak boleh berhenti di situ. "Yang jauh lebih krusial adalah memastikan masalah yang menjadi sumber keluhan benar-benar terselesaikan agar tidak kembali terulang," ucapnya, kemarin.

DPR, lanjutnya, tidak ingin masyarakat terjebak dalam siklus keluhan yang sama dari tahun ke tahun tanpa ada perbaikan mendasar. Kondisi tersebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap program JKN yang sejatinya menjadi salah satu program strategis nasional.

"Yang kita butuhkan bukan sekadar respons cepat, tetapi penyelesaian struktural yang membuat masyarakat yakin keluhan mereka didengar sekaligus diperbaiki," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Keberhasilan JKN, lanjutnya, tidak cukup diukur hanya

dari jumlah peserta atau cakupan layanan. Keberhasilan sejati terletak pada kualitas pelayanan yang mampu mencegah keluhan berulang dan menjamin kepuasan pasien.

"Kalau akar masalahnya tidak dibereskan, jangan heran kalau keluhan yang sama akan terus muncul. Itu yang harus kita hentikan bersama," tegas legislator asal Dapil Jawa Timur V itu.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menyoroti tindakan semena-mena rumah sakit yang membatasi masa rawat inap pasien JKN. BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur pembatasan jumlah hari rawat inap. Tindakan memperlambat pemulangan pasien berpotensi membahayakan keselamatan.

"Banyak kasus pasien baru dirawat tiga hari dipaksa pulang, padahal masih sakit. Bahkan ada yang meninggal karena penanganan tidak tuntas. Ini jelas merugikan masyarakat," kata politikus Partai NasDem itu.

Diceritakannya, ada pasien di Medan, Sumatera Utara, yang dipaksa pulang pihak rumah sakit, padahal masih dalam kondisi menggunakan infus. Lalu, setelah diintervensi, rumah sakit mau merawat pasien lagi, namun beberapa hari kemudian meninggal dunia.

"Rumah sakit tidak boleh hanya berpikir soal risiko atau keuntungan. Sumpah dokter itu menempatkan nilai kemanusiaan di atas segalanya," tegasnya.

Irma juga menyinggung masalah diagnosa yang tidak akurat. Banyak pasien meninggal akibat salah diagnosa awal, seperti kasus pasien sesak napas yang langsung dipulangkan, tetapi ternyata terkena serangan jantung. Untuk itu, dia meminta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menindak rumah sakit yang memberikan pelayanan buruk. ■ PYB